TUDUHAN SELINGKUH : SANKSI DAN PEMBUKTIAN DALAM BINGKAI ADAT

Dody Sulistio¹, Dewi Lestari²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi

Email: dody@uinjambi.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Sanksi Hukum d Bagi Pelaku Tuduhan Perselingkuhan dan mekanisme pembuktiannya Menurut Hukum Adat Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Jambi. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif Diskriptif dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Tuduhan perselingkuhan menurut hukum adat dibuktikan dengan adanya saksi dan sumpah dalam sidang lid. Lembaga adat dalam menegakkan hukum tentang pelaku tuduhan perselingkuhan (fitnah) didasarkan pada peraturan *pucuk undang nan delapan* dalam pasal *dago-dagi*, yaitu segala bentuk perbuatan yang melanggar kepentingan bersama/umum sehingga menimbulkan kekacauan dalam negeri. Seperti kesalahan terhadap pemerintah, membuat fitnah (provokasi) serta membuat kekacauan dalam negeri. Hukumannya adalah bangun penuh yang dilipat duakan, yaitu seekor kerbau, 800 gantang beras, 800 buah kelapa, 8 kabung kain putih dan selemak semanih. Sedangkan menurut ketua adat berupa kerbau, beras, kelapa, selemak semanis, asam segamo, dimakan oleh orang banyak. Sanksi/denda ini dimusyawarahkan dulu oleh aparat adat, lalu sanksi/denda yang dijatuhkan sesuai dengan hasil rembukan yang dilakukan oleh aparat adat. Jika pelaku tidak dapat membayar sanksi, maka ahli warisnya bisa ikut membantu membayarnya, jika tidak ada yang bisa membayar tuntutan tersebut maka bisa dituntut ke pengadilan.

Kata Kunci : Sanksi, Pembuktian, adat, Perselingkuhan

ABSTRACT

This paper aims to find out the Legal Sanctions d for Perpetrators of Infidelity Allegations and their evidentiary mechanisms according to the Customary Law of Lubuk Ruso Village, Pelayung District, Batang Hari Jambi Regency. This research uses Descriptive Qualitative research with data collection methods carried out by observation, interviews and documentation. Based on the research that has been carried out, the following results and conclusions are obtained: Allegations of infidelity according to customary law are proven by the presence of witnesses and oaths in the trial. Customary institutions in enforcing the law on perpetrators of allegations of infidelity (slander) are based on the eight-year-old regulations in the dago-dagi article, namely all forms of acts that violate the common/public interest, causing domestic chaos. Such as mistakes against the government, making slander (provocations) and creating domestic chaos. The punishment was a full, double-folded wake, namely a buffalo, 800 bushels of rice, 800 coconuts, 8 sacks of white cloth and a bag of semanih. Meanwhile, according to the traditional head in the form of buffalo, rice, coconut, semanic selemak, asam segamo, eaten by many people. These sanctions/fines are first discussed by the customary apparatus, then the sanctions/fines imposed are in accordance with the results of the rembukan carried out by the customary apparatus. If the perpetrator cannot pay the sanction, then his heirs can help pay it, if no one can pay the claim then it can be sued in court.

Keywords : Sanctions, Proof, customs, Infidelity

PENDAHULUAN

Lembaga adat adalah suatu wadah atau organisasi yang mana dalam penyelesaian suatu sengketa atau konflik dengan cara musyawarah antara aparat adat yang biasa disebut

dengan musyawarah adat untuk mewujudkan tujuan kehidupan bersama menurut tata tertib hukum adat. Seorang ketua adat dan juga lembaga adat harus mempunyai pengetahuan yang luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk dan situasi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perkataan maupun perbuatan. Apabila tidak demikian, maka ia tidak memiliki kapasitas untuk memberikan sanksi bagi pelanggar hukum.

Seorang dapat dikatakan melanggar hukum, jika dirinya dengan sengaja atau pun tidak sengaja melanggar hukum yang sudah berlaku. Kemudian akan mendapatkan pemeriksaan di lembaga adat dan untuk membuktikan benar atau tidaknya tuduhan melakukan perbuatan yang dituduhkan, oleh karena itu perlu adanya pembuktian dan juga sanksi.

Sanksi diartikan sebagai tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang, sanksi memiliki arti dalam bidang ilmu hukum. Sanksi hukum adat diikat oleh aturan adat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat, dan merupakan pedoman dasar.

Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam hubungan sosial kemasyarakatannya. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi sebagai reaksi oleh masyarakat atau pengurus adat terhadap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Sanksi adat merupakan usaha untuk menetralkan kegoncangan yang terjadi akibat pelanggaran adat. Wujud dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat yang bersangkutan.

Dewasa ini sering muncul konflik-konflik yang berkaitan dengan adat, atau konflik sosial lainnya sering menimbulkan suatu kondisi terganggunya ketentraman, ketertiban dan kesadaran hukum didalam masyarakat. Dalam prakteknya, konflik yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh warga masyarakat adat diselesaikan oleh penguasa adat melalui musyawarah adat dengan menjatuhkan sanksi adat yang diatur dalam hukum adat setempat.

Salah satu bentuk konflik sosial yang terjadi adalah tuduhan perselingkuhan baik dari pihak suami maupun istri. Tuduhan perselingkuhan dalam hukum Islam itu di qiyaskan

kedalam hukum Qadzaf. Qadzaf menurut terminologi adalah melempar dengan batu, sedangkan menurut istilah ialah menuduh orang baik-baik berbuat zina secara terang-terangan. Adapun melakukan qadzaf kepada orang yang sudah menikah (baik perempuan maupun laki-laki) berarti menuduh melakukan zina atau menafikan hubungan nasab anak kepada bapak.

Sehubungan hal tersebut tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut sanksi hukum bagi pelaku tuduhan perselingkuhan menurut hukum adat. Eksistensi hukum adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari menjadikan kajian ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sanksi Hukum Tuduhan Perselingkuhan Menurut Hukum Adat Desa Lubuk Ruso

Dasar pelaksanaan hukum adat tentang tuduhan perselingkuhan (fitnah) terdapat dalam peraturan *pucuk undang nan delapan* pada pasal *dago-dagi*, yaitu segala bentuk perbuatan yang melanggar kepentingan bersama/umum sehingga menimbulkan kekacauan dalam negeri. Seperti kesalahan terhadap pemerintah, membuat fitnah (provokasi) serta membuat kekacauan dalam negeri. Hal ini disebut dalam seloko dengan *mengadah telun nan tinggi, melacak tebung nan menyenak* (menengadah air terjun yang tinggi, mengganggu tawon yang menyengat), *kalu luko duo pampeh, kalu mati duo bangun*. Hukuman bagi pelaku kejahatan ini adalah bangun penuh yang dilipat duakan, yaitu seekor kerbau, delapan ratus 800 gantang beras, delapan ratus 800 buah kelapa, delapan kabung kain putih dan selemak semanih.

Menurut hukum adat sanksi hukum untuk orang yang menuduh selingkuh adalah lebih berat dari hukuman orang yang berbuat zina, karena menuduh selingkuh itu sama halnya dengan fitnah, adat berlandaskan fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan. Sanksi atau denda orang yang menuduh selingkuh selama ia tidak bisa membuktikan tuduhannya dan juga tidak bisa mendatangkan saksi, maka orang yang dituduh bisa menuntut balik orang yang menuduhnya. Di Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari, sanksi atau denda orang yang menuduh selingkuh adalah berupa kerbau, beras, kelapa, selemak semanis, asam segamo, dimakan oleh orang banyak, dan sanksi atau denda juga bisa permintaan apa saja dari orang yang dituduhnya, karena sanksi atau

denda bagi orang yang menuduh selingkuh/fitnah adalah lebih besar dari orang yang berbuat zina maka sanksi atau denda yang dijatuhkan adalah sesuai dengan apapun yang diminta oleh orang yang difitnahnya, tapi sanksi atau denda ini di musyawarahkan dulu oleh aparaturnya, lalu sanksi dan juga denda yang dijatuhkan adalah sesuai dengan hasil rembukan yang dilakukan oleh aparaturnya. Jika orang tersebut tidak dapat membayar sanksi, maka jika ahli warisnya perduli bisa ikut membantu membayarnya, dan jika tidak ada yang bisa membayar tuntutan tersebut bisa dituntut ke pengadilan.

2. Mekanisme Pembuktian Tuduhan Perselingkuhan Menurut Hukum Adat di Desa Lubuk Ruso

Tuduhan perselingkuhan menurut hukum adat dibuktikan dengan adanya saksi dan sumpah dalam sidang lid. Orang yang menuduh selingkuh harus bisa membuktikan tuduhannya dan juga harus bisa mendatangkan saksi. Saksi adalah orang yang mengetahui atau melihat, yaitu orang yang dimintakan hadir dalam suatu persidangan untuk memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan terhadap silang sengketo. Adapun syarat saksi adalah:

1. Muslim
2. Merdeka
3. Dapat berbicara
4. Bukan musuh terdakwa
5. *Dhabit* adalah dalam arti kuat hafalan dari apa yang dilihat maupun didengar, serta dapat memelihara apa yang dilihat atau didengarnya itu.
6. Bukan orang fasik, penghianat atau pezina.

Sedangkan sumpah dalam sidang lid diperlukan dengan ketentuan jika yang menuduh tidak dapat menghadirkan bukti maka sang hakim meminta kepada orang yang tertuduh untuk mengucapkan sumpah, jika dia bersumpah maka dia bebas dan otomatis tuduhan itu gugur. Apabila orang yang dituduh diminta untuk bersumpah, namun dia menolaknya maka putusan hukum ditetapkan berdasarkan tuduhan yang ditujukan kepadanya. Jika bukti orang yang menggugat kurang sempurna, yaitu misalnya hanya mendatangkan satu saksi, padahal dakwaannya tidak dianggap kuat kecuali dengan menghadirkan dua orang saksi, maka sumpahnya dapat diterima sebagai pengganti dari dua orang saksi lalu diputuskan berdasarkan hal tersebut.

Lid adalah nama lain dalam peradilan adat di Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari, dalam memutuskan silang sengketo/perkara adat, guna untuk memutuskan silang sengketo secara adil, arif dan bijaksana. Susunan pengurus lid lembaga adat daerah Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari sampai ketingkat kecamatan, kelurahan dan desa, terdiri dari unsur Ulama, Cerdik pandai dan Tuo Tenganai.

Musyawarah dalam sidang lid ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemerintahan desa sekurang-kurangnya kadus/RT, adapun lokasi musyawarah ini, karena belum adanya balai adat, maka tempat musyawarah disesuaikan dengan kesepakatan dari wilayah yang ada perkara, misalnya kadus 2 sepakat musyawarah di tempat kadus 2, maka musyawarah ditempat kadus 2, jika sepakat musyawarah di tempat RT maka musyawarah ditempat RT, dan jika sudah tidak dapat diselesaikan di wilayah RT masing-masing barulah musyawarah diangkat ke desa. Tidak ada ketentuan tempat untuk musyawarah untuk menyelesaikan perkara, bisa di rumah kadus atau kepala desa, sesuai kesepakatan dari masyarakat/anggota lid.

Tata cara sidang lid sebagai berikut:

1. Sembahan dakwa seseorang atau kelompok diajukan kepada kepala desa sebagai pemangku adat atau ketua lembaga adat dengan menyerahkan sirih pinang sebagai tanda serah diri.
2. Kepala desa sebagai pemangku adat atau ketua lembaga adat terlebih dahulu mengupayakan perdamaian secara keluargaan antara para pihak bersengketo. Jika tidak berhasil maka dilanjutkan ke hukum.
3. Kepala desa sebagai pemangku adat memanggil ketua lembaga adat untuk melakukan upaya hukum atas silang sengketo tersebut. ketua lembaga adat membentuk lid, minimal 3 orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang, dengan melibatkan unsur syara' (imam, bilal, khatib, ulama yang mengerti hukum syara'), orang adat yang mengerti hukum adat dan tokoh masyarakat atau orang pemerintahan yang mengerti hukum adat dan juga administrasi pemerintahan.

Didasarkan kepada hasil pemeriksaan perkara didalam sidang peradilan adat, kemudian para lid mengambil kesimpulan dari pemeriksaan tersebut, lalu menjatuhkan hukuman denda. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur dan adab/kesopanan para lid.

Persyaratan anggota lid adalah:

1. Muslim
2. Baligh
3. Berakal
4. Adil
5. Memiliki pengetahuan undang-undang, hukum syara', agama dan komunikasi
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Dapat membaca dan menulis
8. Rponyo nan ditengok, cakupnya nan dianing
9. Tau diagak nan diagih, batas dengan mentaro.

Etika anggota lid adalah:

1. Hendaklah ia berdomisili dan berumah ditengah-tengah negeri ditempat yang diketahui orang dan dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat.
2. Hendaklah ia megnggap sama terhadap orang-orang yang berperkara
3. Jangan memutuskan hukum dalam keadaan sedang marah, sangat lapar dan haus, sangat susah atau sangat gembira, sedang sakit, sedang menahan buang air yang sangat dan mengantuk.
4. Tidak boleh menerima pemberian dari orang-orang-orang yang sedang berperkara, yng ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.
5. Lid tidak boleh menunjukkan cara mendakwa dan membela.
6. Surat-surat kepada lid yang lain diluar wilayahnya, apabila surat itu berisi hukum hendaklah dipersaksikan oleh dua orang saksi sehingga keduanya mengetahui isi surat tersebut.

Dari pemaparan di atas, dapat diketeahui bahwasanya Desa Lubuk Ruso memiliki pedoman dasar yang sangat rinci terkait dengan sanksi dan pembuktian tuduhan zina. Hal ini yang menjadi salah satu alasan kenapa hukum adat di Desa Lubuk Ruso masih eksis sampai sekarang.

KESIMPULAN

Mekanisme pembuktian tuduhan perselingkuhan menurut hukum adat di desa Lubuk Ruso, tuduhan perselingkuhan menurut hukum adat dibuktikan dengan adanya saksi dan sumpah dalam sidang lid (lid adalah nama lain dalam peradilan adat di Bumi Serentak Bak

Regam Kabupaten Batang Hari, dalam memutuskan silang sengketo/perkara adat, guna untuk memutuskan silang sengketo secara adil, arif dan bijaksana). Hal ini tentunya berbeda dengan pembuktian tuduhan perselingkuhan dalam hukum Islam atau dikenal dengan istilah *qadzaf* yakni menggunakan tiga alat bukti yaitu saksi, pengakuan dan sumpah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Grafika Offset, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Aninudin dan Zain Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Jakarta: Alumni Bandung, 1981.
- Ibnu Qayim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, alih bahasa: Adnan Qahar, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam, *Hukum Adat dan Perda Adat Kabupaten Batang Hari*, Muara Bulian, 2021.
- Lembaga Adat Duduk Tigo Silo, *Materi Pemekalan Adat Lembaga Adat Kabupaten Batang Hari Tungku Tigo Sejerengan Nomor 10 Desa Lubuk Ruso*, Batang Hari, 2016.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shaddiq ard*, alih bahasa: Abu Zaenab AB, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shaddiq*, Cet. I. Jakarta: Lentera, 2009.
- Waluyo, *Penelitian Hukum Data Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.